

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan **Juli 2025**, Kota Banjarbaru mengalami deflasi berturut-turut sepanjang lima minggu.

- Minggu I (M1): IPH tercatat -0,37, dengan komoditas andil terbesar yaitu daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah.
- Minggu II (M2): IPH menurun menjadi -0,55, didorong oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang putih, dan cabai merah.
- Minggu III (M3): IPH berada di angka -0,39, dengan andil utama dari daging ayam ras, bawang putih, dan cabai merah.
- Minggu IV (M4): IPH tercatat -0,23, dengan komoditas berpengaruh yaitu daging ayam ras, bawang putih, dan cabai merah.
- Minggu V (M5): IPH menurun tipis menjadi -0,03, masih dipengaruhi oleh daging ayam ras, bawang putih, dan cabai merah.

Penurunan harga pada hampir seluruh minggu di bulan ini mencerminkan pasokan pangan strategis yang relatif stabil dan melimpah di pasar. Sebagai langkah pengendalian dan pemantauan harga, TPID Kota Banjarbaru secara aktif melaksanakan sidak ke pasar dan distributor serta memperkuat pengawasan harga pangan.

Pada bulan **Agustus 2025**, pergerakan harga mulai menunjukkan tekanan inflasi ringan di setiap minggunya.

- Minggu I (M1): IPH tercatat 0,08, dengan komoditas penyumbang utama cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang merah.
- Minggu II (M2): IPH meningkat menjadi 0,16, masih dipengaruhi oleh cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang merah.
- Minggu III (M3): IPH naik ke 0,27, dengan andil terbesar dari daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah.
- Minggu IV (M4): IPH kembali meningkat menjadi 0,34, didorong oleh daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah.

Kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan pokok serta fluktuasi pasokan komoditas hortikultura akibat faktor cuaca. Dalam rangka menjaga stabilitas harga, TPID Kota Banjarbaru melaksanakan sidak ke pasar dan distributor serta memperkuat koordinasi pengawasan harga di lapangan.

Pada bulan **September 2025**, Kota Banjarbaru kembali mencatat tren deflasi cukup signifikan pada tiga minggu pertama.

- Minggu I (M1): IPH sebesar -0,30, dengan komoditas andil terbesar bawang merah, cabai rawit, dan ikan kembung.
- Minggu II (M2): IPH menurun menjadi -0,37, dipengaruhi oleh penurunan harga bawang merah, beras, dan telur ayam ras.
- Minggu III (M3): IPH mengalami deflasi lebih dalam sebesar -0,80, dengan komoditas

- berpengaruh bawang merah, beras, dan telur ayam ras.
- Minggu IV (M4): tidak dilakukan penghitungan IPH.

Penurunan harga pada bulan ini menunjukkan membaiknya pasokan komoditas pangan strategis di pasar, terutama beras dan telur ayam ras. Kondisi ini tidak lepas dari upaya TPID Kota Banjarbaru yang konsisten melakukan sidak pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi lintas instansi untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Banjarbaru Pada TRIWULAN III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Fluktuasi Harga Komoditas Strategis

Harga beberapa komoditas strategis seperti beras, cabai rawit merah, bawang merah, dan daging ayam ras masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh perubahan pasokan dari daerah pemasok serta meningkatnya permintaan pada periode tertentu.

- Ketergantungan terhadap Pasokan dari Luar Daerah

Struktur pasokan bahan pokok di Kota Banjarbaru masih sangat bergantung pada daerah lain. Ketika terjadi gangguan distribusi atau keterlambatan pasokan, harga komoditas di tingkat konsumen cenderung meningkat. Hal ini menandakan perlunya penguatan produksi dan rantai pasok lokal.

- Belum Optimalnya Kerja Sama Antar Daerah

Dari sembilan langkah konkret pengendalian inflasi daerah, satu langkah yang belum terlaksana adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas. Belum terbangunnya mekanisme kerja sama ini menghambat upaya stabilisasi harga ketika terjadi kelangkaan pasokan di pasar lokal.

- Keterbatasan Sarana dan Efisiensi Distribusi

Walaupun Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan berbagai upaya seperti bantuan transportasi distribusi dan program angkutan gratis, efisiensi sistem logistik dan distribusi bahan pokok masih dapat ditingkatkan. Biaya transportasi yang tinggi dan keterbatasan jalur distribusi dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kota Banjarbaru pada Triwulan III tahun 2025 ini, TPID Kota Banjarbaru terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K, yaitu:

- **Keterjangkauan harga:**

Dalam rangka menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di Kota

Banjarbaru, Pemerintah Kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi lintas perangkat daerah dengan dukungan anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bersumber dari APBD serta Dana Insentif Daerah.

Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah pelaksanaan operasi pasar reguler dan khusus yang bertujuan menekan harga komoditas strategis seperti beras, cabai rawit merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Kegiatan ini dilakukan ketika terjadi lonjakan harga di pasar untuk memastikan harga tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota juga secara aktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pelaksanaan GPM ini menjadi salah satu bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Kebijakan lain yang turut mendukung keterjangkauan harga adalah bantuan transportasi distribusi bahan pokok, yang dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya logistik dan menjaga kelancaran pasokan antar wilayah di dalam kota. Pemerintah juga memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Non-BTT untuk mendukung kegiatan stabilisasi harga, termasuk pembiayaan operasi pasar, kegiatan pengawasan stok, dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Selain intervensi langsung terhadap harga, Pemerintah Kota Banjarbaru juga melaksanakan gerakan menanam dan peningkatan produksi pangan melalui pemberdayaan kelompok tani lokal. Langkah ini bertujuan memperkuat ketersediaan pasokan di tingkat daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar harga tetap terkendali.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, dilakukan pula pemantauan harga dan stok harian oleh Dinas Perdagangan melalui survei di pasar tradisional dan modern. Hasil pemantauan dilaporkan secara rutin ke dalam sistem wasinflasi.kemendagri.go.id sehingga memungkinkan pemerintah melakukan langkah cepat apabila terjadi gejolak harga.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjaga keterjangkauan harga sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, dukungan transportasi, serta penguatan pasokan lokal, stabilitas harga bahan pokok di Kota Banjarbaru dapat terus dipertahankan dalam kisaran yang wajar dan tidak memberatkan masyarakat

◦ **Ketersediaan Pasokan**

Dalam upaya menjaga kestabilan harga dan mengantisipasi potensi kelangkaan komoditas strategis, Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi, khususnya dalam menghadapi periode rawan gejolak harga akibat gangguan distribusi atau peningkatan permintaan.

Salah satu langkah yang menonjol adalah pelaksanaan Gerakan Menanam dan Peningkatan

Produksi Pangan. Melalui kegiatan Farm Field Day yang melibatkan kelompok tani, Pemerintah Kota mendorong peningkatan produksi komoditas strategis seperti cabai, sayuran, dan bahan pangan lokal lainnya. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah yang selama ini menjadi faktor pemicu fluktuasi harga.

Selain itu, Pemerintah Kota juga melakukan pemantauan harian terhadap 20 komoditas strategis, termasuk beras, ayam ras, telur, cabai, bawang, minyak goreng, dan gula. Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Dinas Perdagangan melalui survei di pasar tradisional maupun modern. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan ke dalam sistem wasinflasi.kemendagri.go.id sebagai dasar pengambilan kebijakan cepat ketika terjadi potensi gangguan pasokan atau kenaikan harga.

Untuk menjamin kelancaran distribusi, Pemerintah Kota juga melaksanakan bantuan transportasi distribusi bahan pokok, termasuk penyediaan sarana angkutan gratis bagi pelajar, layanan Buy The Service (BTS), serta program Angkutan Gratis di berbagai trayek. Kebijakan ini turut membantu menekan biaya logistik dan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok berjalan lancar hingga ke masyarakat.

Lebih lanjut, Pemerintah memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang di pasar, terutama pada periode menjelang hari besar keagamaan nasional dan saat terjadi fluktuasi pasokan dari daerah pemasok. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam memperkuat rantai pasok lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro di sektor pangan, sehingga pasokan di tingkat lokal dapat lebih berkelanjutan dan merata.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kerja sama antar daerah penghasil komoditas masih perlu diperkuat. Hingga Triwulan III Tahun 2025, langkah kerja sama lintas daerah tersebut merupakan satu-satunya dari sembilan langkah konkret pengendalian inflasi yang belum terealisasi. Ketiadaan mekanisme kerja sama ini menyebabkan upaya stabilisasi pasokan belum optimal ketika terjadi gangguan produksi di wilayah pemasok utama.

Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah berupaya menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi lokal, pemantauan intensif, dan dukungan logistik yang memadai. Meskipun demikian, optimalisasi kerja sama antar daerah dan penguatan rantai pasok lokal masih menjadi fokus yang perlu ditingkatkan agar stabilitas pasokan dan harga dapat lebih terjamin di masa mendatang.

◦ **Kelancaran Distribusi**

Aspek kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya memperbaiki sistem distribusi bahan pokok agar pasokan dapat tersalurkan dengan lancar dari produsen hingga ke konsumen tanpa menimbulkan kenaikan harga yang signifikan.

Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan transportasi untuk distribusi bahan pokok. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama naiknya harga barang di

tingkat konsumen. Kebijakan ini juga diperkuat dengan penyediaan layanan transportasi publik gratis seperti angkutan gratis pelajar, angkutan mudik gratis, serta layanan Buy The Service (BTS) dan Angkutan Gratis yang beroperasi di berbagai trayek dalam kota. Selain mendukung mobilitas masyarakat, langkah ini turut membantu efisiensi pergerakan barang dan jasa dalam wilayah Kota Banjarbaru.

Selain itu, Pemerintah Kota juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi TPID secara rutin setiap minggu. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas kondisi terkini distribusi, stok, dan harga komoditas di lapangan. Melalui koordinasi ini, hambatan dalam rantai distribusi dapat segera diidentifikasi dan diatasi, termasuk dalam hal penyaluran pasokan dari daerah pemasok utama.

Dalam mendukung kelancaran arus distribusi, Pemerintah juga melaksanakan operasi pasar dan inspeksi lapangan (sidak) ke pasar tradisional dan distributor. Tujuannya adalah memastikan tidak terjadi penimbunan, kelangkaan, atau praktik dagang yang dapat menghambat kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Upaya ini dilaksanakan bersama Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta aparat pengawasan terkait.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal keterbatasan jalur distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan dari daerah pemasok dapat langsung berdampak terhadap harga di pasar lokal. Oleh karena itu, perlu penguatan kerja sama antar daerah dan peningkatan kapasitas distribusi lokal agar pergerakan barang lebih efisien dan stabil.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui TPID telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Dengan kombinasi kebijakan transportasi publik, dukungan logistik, forum koordinasi intensif, dan pengawasan distribusi, pemerintah berhasil menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran pasokan di pasar tradisional maupun ritel modern.

◦ **Komunikasi Efektif**

Komunikasi yang efektif antara pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan ekspektasi inflasi di daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten melaksanakan berbagai langkah komunikasi publik yang transparan, terarah, dan berkelanjutan untuk mendukung efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.

Salah satu bentuk utama komunikasi efektif yang telah dilakukan adalah melalui pelaporan dan publikasi data harga serta stok komoditas secara harian. TPID Kota Banjarbaru, melalui Dinas Perdagangan, secara rutin melaporkan perkembangan harga 20 komoditas strategis ke dalam sistem nasional wasinflasi.kemendagri.go.id. Pelaporan harian ini tidak hanya menjadi sarana monitoring internal pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi publik yang memberikan kepastian informasi mengenai kondisi harga di lapangan.

Selain pelaporan digital, Pemerintah Kota Banjarbaru juga aktif melaksanakan Rapat Koordinasi TPID secara mingguan, yang tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi antar perangkat daerah, tetapi juga sebagai media komunikasi kebijakan kepada stakeholder, pelaku

usaha, dan masyarakat. Melalui forum ini, pemerintah dapat menyampaikan perkembangan inflasi terkini, langkah intervensi yang sedang dijalankan, serta rencana tindak lanjut untuk menjaga kestabilan harga.

Upaya komunikasi juga dilakukan melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, dan gerakan menanam, yang disebarluaskan melalui media massa, kanal resmi pemerintah, dan media sosial. Informasi ini berperan penting dalam menjaga persepsi positif masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok, sehingga dapat mencegah kepanikan pembelian (panic buying) dan spekulasi harga.

Selain itu, Pemerintah Kota juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait pengendalian inflasi, terutama pada momen-momen tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, Idulfitri, dan akhir tahun. Edukasi ini meliputi ajakan untuk berbelanja bijak, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta mendukung gerakan menanam bahan pangan sendiri untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Konsistensi dalam penyampaian informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kestabilan ekspektasi harga. Bentuk komunikasi yang aktif, baik melalui pelaporan data maupun kegiatan publik, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah menerapkan prinsip komunikasi efektif secara optimal dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengendalian inflasi hingga Triwulan III Tahun 2025, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui TPID dinilai telah melaksanakan sebagian besar langkah konkret pengendalian inflasi dengan capaian yang baik. Realisasi anggaran pengendalian inflasi mencerminkan adanya komitmen namun masih terdapat ruang untuk optimalisasi penggunaan anggaran.

Delapan dari sembilan langkah konkret pengendalian inflasi telah dilaksanakan secara efektif, mencakup operasi pasar, sidak pasar, pemantauan stok, High Level Meeting mingguan, gerakan menanam, bantuan transportasi distribusi, gerakan pangan murah, serta pemanfaatan Dana BTT. Satu langkah yang belum terlaksana, yaitu kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, masih menjadi tantangan yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat ketahanan pasokan.

Secara umum, koordinasi lintas SKPD berjalan dengan baik, terbukti melalui pelaporan rutin ke wasinflasi.kemendagri.go.id dan penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal yang diterima sebanyak tiga kali dalam dua tahun terakhir. Upaya inovatif seperti penyediaan angkutan gratis pelajar dan layanan transportasi BTS turut memberikan kontribusi dalam menekan biaya logistik dan menjaga keterjangkauan harga.

Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru dapat dinilai efektif dan adaptif, meskipun masih diperlukan penguatan kerja sama antar daerah serta peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program dan realisasi anggaran.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru Tahun 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi di masa mendatang.

Pertama, perlu dilakukan penguatan kerja sama antar daerah penghasil dan konsumen komoditas strategis guna memastikan stabilitas pasokan dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah pemasok tunggal. Langkah ini menjadi prioritas karena merupakan satu-satunya dari sembilan langkah konkret pengendalian inflasi yang belum terlaksana secara optimal.

Kedua, Pemerintah Kota perlu meningkatkan optimalisasi realisasi anggaran pengendalian inflasi, Perencanaan dan penjadwalan kegiatan perlu disesuaikan agar pelaksanaan intervensi pasar, gerakan pangan murah, dan pemantauan harga dapat dilakukan lebih tepat waktu dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan ketahanan pangan lokal dengan memperluas gerakan menanam, dukungan terhadap kelompok tani, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di sektor pangan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan di tingkat lokal serta menjaga harga tetap stabil.

Keempat, efisiensi sistem distribusi dan logistik pangan perlu terus ditingkatkan dengan memperluas program bantuan transportasi, memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha distribusi, serta memanfaatkan sarana transportasi publik yang ada agar pergerakan barang lebih lancar dan biaya distribusi dapat ditekan.

Kelima, TPID disarankan untuk meningkatkan kualitas dan integrasi data harga dan stok antar perangkat daerah, guna mempercepat respons terhadap perubahan harga di lapangan. Pelaporan melalui sistem wasinflasi.kemendagri.go.id perlu dikembangkan sebagai sumber informasi strategis dalam pengambilan kebijakan.

Keenam, diperlukan penguatan komunikasi publik dan edukasi konsumen, terutama menjelang hari besar keagamaan dan periode rawan inflasi. Edukasi mengenai pola konsumsi bijak dan informasi kegiatan stabilisasi harga akan membantu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap kestabilan harga.

Terakhir, perlu dilakukan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal (DIF) dan Dana BTT secara tepat sasaran agar kegiatan pengendalian inflasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif, serta berdampak nyata terhadap stabilitas harga di tingkat lokal.

Melalui pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru dapat semakin terarah, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.